

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nelayan di Indonesia masih identik pada keluarga prasejahtera. Hal ini bisa dilihat dari kondisi nelayan di Indonesia yang masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan yang bergantung pada kondisi alam sehingga nelayan tidak bisa sewaktu-waktu untuk melaut. Indonesia merupakan negeri kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,2 juta km². Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, luas laut yang sekitar 3,2 juta km² terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².

Perairan Indonesia juga memiliki potensi sumber daya hayati dan non hayati yang melimpah. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tinggal dan menempati daerah sekitar wilayah pesisir serta menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Sebelum menggambarkan bagaimana ruang kehidupan nelayan dan proses-proses sosial yang mereka jalani berhadapan dengan perubahan yang melanda mereka, kita sebaiknya merujuk lebih dahulu pada pengertian dasar 'nelayan' itu sendiri¹

Urgensi modernisasi perikanan melalui perbaikan teknologi atau alat tangkap untuk meningkatkan produksi dapat di pahami. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa kita masi *under capacity* untuk memanfaatkan potensi perikanan budidaya maupun tangkap. Lebih-lebih untuk

¹ Lih. Basri Amin, et.al., *Nelayan dan Perubahan Ruang di Pesisir Utara Gorontalo*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2012),

ipenangkapan di perairan ZEEI. Ini memang sesuai dengan hukum internasional bahwa kita tidak dapat melarang kapal asing melakukan operasi penangkapan ikan meskipun kita sendiri tidak mampu memanfaatkan potensi perikanan yang ada.

Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Menyelesaikan masalah kemiskinan merupakan agenda pemerintah yang sangat penting dan relatif pelik. Kerumitan tersebut di sebabkan oleh karena kemiskinan menyentuh pada banyak sektor dengan demikian pendekatan yang harus di lakukan juga harus bersifat multidimensional dengan memahami memahami permasalahan secara mendasar (sulistiyani, 2004:20)²

Topik pemberdayaan nelayan penting di kaji untuk mengatasi problem besar nelayan, kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan dan keterasingan. Seperti yang di sebutkan, hal tersebut merupakan ironi karena terjadi justru di tengah masyarakat yang bekerja mencari sumberdaya yang melimpah. Untuk itu, memang tidak ada jalan lain kecuali mengeluarkan nelayan dari perangkap keterbelakangan seperti itu. Kemudian pertanyaanya adalah bagaimana melakukan pemberdayaan yang efektif sehingga nelayan dapat mengalami mobilitas vertical sekaigus keluar dari jebakan-jebakan yang memarjinalkan posisinya.

Namun, formulasi konsep pemberdayaan tersebut sulit di lakukan tanpa pemahaman tentang pergeseran paradigm pembangunan yang melatarbelakangi munculnya gagasan pemberdayaan serta pemahaman tentang karakteristik sosial nelayan suatu kelompok manusia yang akan diberdayakan.

² Nurhayati Botutihe. Skripsi: "*Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*" (Gorontalo: Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo, 2016), hlm. 1.

(Menurut Daryanto 2007 dalam Arif Satria) sumber daya pada sektor perikanan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari bahwa pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari segi kuantitas maupun diversitas. Kedua, adanya keterkaitan sektor-sektor lain terhadap sektor perikanan. Ketiga, industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau lebih dikenal dengan istilah *national resources based industries*, dan keempat Indonesia sektor perikanan Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) sebagaimana yang dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada. Dengan potensi sektor perikanan yang sangat besar, seharusnya nelayan sebagai penggerak utama dari sektor perikanan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kenyataan yang ada masih banyak permasalahan dalam pembangunan di wilayah pesisir dan lautan. Selain itu, masih banyak nelayan Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

Provinsi Sulawesi tengah terletak di bagian tengah pulau Sulawesi. Luas wilayah 63.305 Km² atau 6.330.466,82 Ha. Luas wilayah daratan tersebut adalah 36,7 persen dalam dari luas Sulawesi, luas perairan Sulawesi tengah mencapai 193.923,75 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 1.402 pulau batas-batas wilayah provinsi. Berdasarkan administrasi provinsi Sulawesi tengah terdiri atas 10 kabupaten dan 1 kota meliputi kabupaten Donggala, Poso, Tolitoli, Banggai, Buol, Morowali, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una Sigi dan Kota Palu.

Provinsi Sulawesi tengah mempunyai potensi yang besar untuk sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan visi gubernur Sulawesi tengah 2011-2016, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang akan dikembangkan. Pemerintah Sulawesi tengah bersama dengan pemerintah kabupaten /kota akan berupaya memberikan kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang baik, penyiapan sarana prasarana dasar, kemudahan

akses modal, aspek perijinan, insentif pajak dan jaminan berusaha yang kondusif bagi pelaku usaha.³

Kecamatan paleleh merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan di kabupaten buol, dan kecamatan paleleh terdiri dari 12 (dua belas) desa, dan desa paleleh memiliki 1.202 jiwa yang sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan, Kegiatan perikanan di Desa Paleleh menjadi salah satu pendapatan perikanan yang cukup besar dimana di Desa ini terdapat Pelabuhan Perikanan. Dengan adanya fasilitas yang terbatas, banyak masyarakat Desa Paleleh yang berprofesi sebagai nelayan. Tetapi kondisi keluarga nelayan di Desa Paleleh masih dalam kondisi miskin.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka peran istri menjadi sangat penting dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga nelayan. Dari 10 beberapa istri nelayan di Desa Paleleh, mereka berusaha untuk bekerja guna membantu menambah pendapatan keluarga nelayan. Apalagi ketika kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk melaut, maka keluarga nelayan banyak bergantung dari pendapatan yang lain. Maka karakteristik dan peran istri nelayan untuk menambah pendapatan keluarga nelayan menjadi alternatif untuk mengurangi kemiskinan keluarga nelayan. Oleh karena itu, agar mereka bisa keluar dari belenggu kemiskinan perlu ada intervensi (dorongan dari luar) untuk memberdayakan mereka melalui program-program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, pemerintah Kecamatan Paleleh telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir agar dapat membantu ekonomi masyarakat Desa Paleleh.

Kebijakan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Nelayan Tangkap adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang ditujukan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan nelayan di Indonesia. Adapun program ini

³ Dinas kelautan dan perikanan daerah provinsi Sulawesi tengah, 2011-2016. *Peluang investasi kelautan perikanan di Sulawesi tengah*. Palu. Pengantar kepala dinas kelautan dan perikanan Sulawesi tengah

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Republik Indonesia Nomor Per./41/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional.

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap adalah salah satu bagian dari Peraturan Menteri ini bertujuan:

- 1) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di pedesaan sesuai dengan potensi sumber daya ikan.
- 2) Menumbuhkan kewirausahaan nelayan di pedesaan
- 3) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan⁴.

Kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan fakta bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47 % di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan⁵. Data statistik menunjukkan bahwa upah riil harian yang diterima seorang buruh tani (termasuk buruh nelayan) hanya sebesar Rp. 30.449,- per hari. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan upah nominal harian seorang buruh bangunan biasa (tukang bukan mandor) Rp. 48.301,- per hari. Di antara kategori pekerjaan atau profesi yang terkait dengan kemiskinan, maka nelayan sering dikategorikan sebagai masyarakat termiskin dari berbagai kelompok masyarakat lainnya

Di Desa Paleleh kebijakan ini telah dilaksanakan semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun saat ini. Adapun penanggung jawab pelaksanaannya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan

⁴ Michael Mamentu. "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Kota Manado" Jurnal, 2015. Universitas Sam Ratulangi. Hal 2.

⁵ *Ibid Hal 2*

Kabupaten Buol. Terdapat 3 (Tiga) Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu kelompok Tuna Biru, Tuna Expres dan Hiu Jaya. Masing –masing disetiap kelompok terdiri 10 (Sepuluh) Orang. Nelayan Tangkap di Desa Paleleh yang diterapi oleh program ini. Kenyataan setelah 4 tahun kebijakan ini diimplementasikan, ternyata tidak terjadi perubahan yang signifikan atas tingkat produksi dan kualitas pendapatan pada 3 KUB Nelayan Tangkap yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian yaitu Atas dasar persoalan yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pemberdayaan Pelaksanaan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Nelayan Tangkap di Desa Paleleh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dari peneliatian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan Pelaksanaan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Nelayan Tangkap di Desa Paleleh

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat adalah gambaran mengenai pola pemberdayaan masyarakat nelayan. Nantinya, diharapkan menjadi masukan dan referensi yang sangat berarti bagi nelayan dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.

1.4.2 Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian keluarga nelayan.

1.4.3 Bagi akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pola pemberdayaan masyarakat nelayan.